

EFEKTIVITAS AKREDITASI DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN MUHAMMADIYAH

Dicky Artanto¹, Hasan Ibadin², Suwadi³

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta^{1,2}

E-Mail : 21204091012@student.uin-suka.ac.id¹, 21204012047@student.uin-suka.ac.id², Suwadi@uin-suka.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengupas terkait efektivitas akreditasi yang diperoleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dengan kualitas pendidikan yang diberikan pada peserta didiknya. Akreditasi seyogyanya dapat memberikan dampak yang baik bagi kualitas layanan pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Informan yang digali ialah kepala sekolah, guru, dan karyawan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode Miles dan Huberman yakni dengan pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, serta untuk keabsahan data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implikasi akreditasi di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan secara umum berhak untuk mendapatkan akreditasi A karena menerapkan standar pendidikan nasional. Namun masih terdapat kekurangan berupa fasilitas yang masih perlu untuk diperbaiki dan ditambah. Akreditasi yang diperoleh menjadikan SMP Muhammadiyah 1 Prambanan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dengan dibuktikan naiknya jumlah peminat dari kurun waktu 2020 hingga 2022, sehingga dapat membuka enam rombongan belajar bagi kelas 7 dan 8 dan lima rombongan belajar bagi kelas 9.

Kata Kunci : Akreditasi, Mutu Pendidikan, Perguruan Muhammadiyah

Pendahuluan

Pola berpikir kritis masyarakat untuk mengevaluasi ketersediaan layanan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan arus komunikasi dan informasi yang dapat diakses dari mana saja. Pendapat orang-orang tentang persyaratan dunia profesional di tempat kerja terkait erat dengan keadaan ini. Akibatnya, masyarakat terutama orang tua menjadi lebih selektif dalam beberapa tahun terakhir untuk memilih dan mengevaluasi kualitas lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan Islam (Luluk Atirotu Zahroh, 2018; Rahman, 2020).

Pembahasan kualitas pendidikan tidak mudah dibahas dalam persoalan ini. Bagi pengelola lembaga pendidikan, memperoleh pendidikan yang benar-benar berkualitas tinggi adalah tugas yang menantang yang diperumit oleh kebutuhan untuk mematuhi peraturan nasional yang ketat untuk keunggulan pendidikan (I Putu Suardipa, 2020). Kompleksitas pencapaian standar pendidikan yang tinggi berkaitan dengan betapa rumit dan relevannya kurikulum saat ini dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat kelas modern. Seperti yang telah ditetapkan, fakta ini terkait

dengan seberapa baik lulusan (atau output lainnya) dapat menanggapi masalah dan bertindak secara profesional di tempat kerja (Afridoni, Suntama Putra, Salfen Hasri, 2022).

Menurut sudut pandang ini, dinamika dan kesulitan yang ada tidak dapat diabaikan di sektor pendidikan. Pengelola pendidikan Islam harus mampu bersaing secara sehat dalam pasar pendidikan yang semakin kompetitif dan objektif mengingat semakin banyaknya lembaga pendidikan dan beragamnya program yang ditawarkan. Kualitas/ mutu merupakan rahasia kesuksesan yang harus dimiliki dan sekaligus daya saing yang paling efektif. Siapa pun yang memiliki kualitas akan memiliki peluang yang sangat bagus untuk menguasai pasar (Amri et al., 2022).

Kualitas lembaga pendidikan dapat diukur salah satunya dengan capaian akreditasi yang diperoleh lembaga tersebut. Menurut satu interpretasi, akreditasi adalah proses yang digunakan untuk mengevaluasi kelayakan program setiap unit pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Rahman, 2020). Akreditasi ini digunakan sebagai bahan pengujian dan penjaminan mutu untuk pengajaran. Hal ini menjadi tolak ukur bagi semua jenjang penyelenggaraan pendidikan. Selain itu, tingkat keadaan aktual di sekolah yang memenuhi standar pendidikan nasional yang ditetapkan ditentukan oleh akreditasi ini (Kumala & Hakim, 2021).

Setiap sekolah memiliki mekanisme untuk mendorong sekolah memperluas kapasitas mereka. Sebagai bagian dari akreditasi sekolah, penilaian digunakan sebagai data pemantauan untuk menentukan seberapa jauh sekolah telah mencapai tujuan. Kualitas lembaga pendidikan juga dapat ditentukan oleh akreditasinya. Agar pelaksanaan sistem akreditasi dapat berjalan secara terstruktur dan sistematis, perlulah ada sebuah badan yang secara khusus mengatur tentang sistem akreditasi ini yang kemudian dibentuk Badan Akreditasi Nasional (BAN). BAN memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kelayakan penyelenggaraan pendidikan.

Di tingkat sekolah/madrasah, badan akreditasi ini disebut dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). BAN S/M merupakan suatu badan evaluasi independen yang bertugas memberikan ketetapan mengenai kelayakan program dan atau satuan pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang sudah ditetapkan (Awaludin, 2017). Sebuah badan atau lembaga yang bertugas untuk menilai sejauh mana kesesuaian antara nilai-nilai di dalam standar nasional pendidikan dengan praktik pendidikan yang berlangsung di lapangan. Diharapkan, dengan adanya

badan atau lembaga khusus yang menangani akreditasi ini, penyelenggaraan pendidikan baik dari tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi, dapat meningkatkan kemampuannya.

Akan tetapi, sekalipun sistem akreditasi ini telah disusun sedemikian rupa, namun pada pelaksanaannya belum banyak sekolah yang mampu memanfaatkan instrumen yang ada dalam akreditasi tersebut untuk meningkatkan kapasitas lembaga pendidikannya. Fakta ini terlihat dari masih maraknya sekolah yang memenuhi instrumen akreditasi ketika hendak dilaksanakan kegiatan visitasi semata, dan kemudian kembali tidak berjalan optimal manakala proses visitasi telah usai dilaksanakan. Produktifitas sekolah menjadi meningkat ketika proses akreditasi akan dilakukan yakni dengan penyiapan dokumen sesuai dengan aturan yang ada, namun ketika akreditasi telah usai dilaksanakan produktifitas komponen akan kembali seperti semula (Azizah & Witri, 2021).

Sekolah terkesan memenuhi kelengkapan hanya saat akan akreditasi saja, setelah usai akreditasi semuanya kembali pada habituasi biasanya. Berangkat dari paparan diatas maka penelitian ini mengupas terkait efektivitas akreditasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan Muhammadiyah. Diketahui bahwa Muhammadiyah merupakan organisasi Islam terbesar yang memiliki banyak perguruan baik dari jenjang kanak – kanak hingga perguruan tinggi, oleh karenanya perlu diketahui pula bagaimana Muhammadiyah dalam menjaga kepercayaan masyarakat dengan mengedepankan kualitas lembaga dengan akreditasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Sugiyono menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah teknik yang dibangun di atas filosofi postpositivis yang digunakan untuk menilai keadaan objek alam dan menitik beratkan peneliti sebagai alat utama, (Sugiyono, n.d.) maksud penelitian dalam kondisi objek yang alamiah ialah berbeda dengan eksperimen, penelitian dalam pengaturan objek alami memiliki tujuan yang berbeda. Menurut Patton, penelitian kualitatif bertujuan untuk menyelidiki fenomena yang terjadi pada suatu peristiwa dari perspektif ilmiah. Penelitian kualitatif ini sangat bergantung pada data ilmiah, yang dikumpulkan langsung dari subjek penelitian. (Rulam Ahmadi, 2016) Asep Kurniawan menegaskan bahwa data kualitatif tidak dapat diperoleh secara langsung melainkan melalui proses yang melibatkan prosedur analisis mendalam. (Asep Kurniawan, 2018)

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh objek penelitian selama wawancara dan pengumpulan data terkait sumber data kualitatif diperoleh. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif karena artikulasi masalah dan tujuan penelitian menjadi landasan tersendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait efektivitas akreditasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan Muhamadiyah, dalam hal ini ialah SMP Muhammadiyah 1 Prambanan.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Tujuan dari analisis kualitatif adalah untuk menjelaskan, mengkarakterisasi, dan mengevaluasi dengan cara mengetahui keadaan dan variabel yang terjadi daripada untuk mengukur hipotesis tertentu dari suatu peristiwa yang terjadi. (Irkhamiyati, 2017) Metode ini dipilih karena hasil penelitian akan memberikan gambaran analitis deskriptif tentang bagaimana efektivitas akreditasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, maka dipilih pendekatan analisis kualitatif ini. Menurut Lincoln, metodologi penelitian yang dipilih adalah fenomenologi, yang bertujuan untuk menyelidiki sesuatu yang sedang terjadi baik dalam bentuk masalah maupun kejadian dalam rentang waktu tertentu. (Rulam Ahmadi, 2016) Peneliti memilih penelitian ini dengan pendekatan fenomenologi karena peneliti menginginkan dapat informasi yang mendalam dari fokus penelitian tentang bagaimana efektivitas akreditasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Penelitian ini dilakukan selama kurun waktu Tanggal 10 hingga 25 November 2022. Adapun informan penelitian ialah kepala sekolah, perwakilan guru, karyawan, dan murid.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Akreditasi

Dalam beberapa literatur, akreditasi dimaknai sebagai suatu proses untuk memberikan penilaian terhadap kualitas menggunakan kriteria baku mutu yang sudah ditetapkan yang sifatnya terbuka (Garnika, 2022). Dalam sistem akreditasi ini sekolah akan dilihat apakah telah memenuhi syarat nasional penyelenggaraan pendidikan ataukah belum, serta melalui akreditasi dapat mengukur program – program yang layak dan dibutuhkan oleh sekolah (Kurnaesih, 2019). Kelayakan penyelenggaraan pendidikan ini dilihat dari sejauh mana lembaga pendidikan tersebut memenuhi atau bahkan melampaui standar nasional pendidikan. Akreditasi ini dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaiannya terhadap proses pembelajaran yang berjalan di setiap satuan pendidikan yang dilakukan oleh BAN S/M.

Oleh karenanya sekolah harus memiliki habituasi yang mendukung agar akreditasi dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam akreditasi yang menjadi penilaian ada delapan standar nasional pendidikan, diantaranya :

a. Standar isi

Standar isi memuat sekumpulan materi dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mengukur ketercapaian kompetensi lulusan di setiap jenjang pada setiap jenis pendidikan tertentu. Mutu standar isi berfokus pada muatan konten pelajaran yang terangkum dalam kurikulum. Standar isi disesuaikan dengan standar kompetensi lulusan yang hendak dicapai(Wening, 2020).

b. Standar kompetensi lulusan

Standar kompetensi lulusan merupakan salah satu dari beberapa standar nasional pendidikan yang isinya termuat kualifikasi yang hendaknya dipenuhi oleh semua peserta didik, di setiap tingkat pendidikan yang isinya antara lain aspek sikap, pengetahuan serta keterampilan(Garnika, 2022). Standar ini dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kelulusan peserta didik. Dalam proses akreditasi, lulusan yang berprestasi baik secara akademik maupun non akademik dilakukan pendataan. Prestasi akademik berasal hasil tes kemampuan dalam bidang akademik. Sedangkan prestasi pada bidang non akademik dapat berupa prestasi di bidang olahraga, seni dan lain sebagainya. Semuanya masuk ke dalam sistem penilaian akreditasi

c. Standar proses

Standar proses menjelaskan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran disatuan pendidikan guna untuk mencapai standar lulusan yang hendak dicapai(Wening, 2020). Standar proses ini meliputi seluruh aktifitas pembelajaran yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai hasil pembelajaran. Pembelajaran akan disebut efektif apabila materi ajar yang dipersiapkan dapat dipahami siswa. Karenanya, dalam proses akreditasi, akan dilakukan pengamatan antara lain kesesuaian antara rencana pembelajaran dengan visi misi sekolah, penyiapan sumber belajar dan alat peraga(Wening, 2020).

d. Standar sarana dan prasarana

Standar sarana dan prasarana merupakan pelayanan minimal yang berkaitan dengan fasilitas yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media, buku serta sumber bahan belajar lainnya. Sedangkan prasarana berkaitan dengan fasilitas tidak bergerak yang meliputi ruangan kelas, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, ruang guru, gedung perpustakaan, laboratorium, serta tempat ibadah (Kurnaesih, 2019). Dalam standar sarana dan prasarana ini sarana penunjang pendidikan diatur dalam peraturan undang – undang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 241/ P / 2019 diatur luas minimum lahan bangunan 1 lantai yakni sebesar 5299 m², bangunan 2 lantai 2793 m², dan bangunan lantai 3 lantai sebesar 1872 m² jika sekolah tersebut memiliki rombongan belajar yang berkisar antara 7 sampai 9 kelas (Wening, 2020). Ukuran luas lahan minimum ini tentunya berbeda pada tiap jenjangnya.

e. Standar pengelolaan

Standar ini berisi kriteria-kriteria yang memuat aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, baik dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat nasional agar penyelenggaraan pendidikan dapat tercapai secara efisien serta efektif (Heny Damayanti, 2019). Berbekal dari standar pengelolaan ini maka dalam menyusun visi tujuan sekolah diharuskan menampung aspirasi dari seluruh stakeholder sekolah dengan mempertimbangkan standar pendidikan nasional. Hal ini sangat penting karena untuk mencapai tujuan harus dituangkan dalam visi dan dijabarkan secara terperinci dalam misi sebagai arah untuk ketercapaian visi. Setelah itu, aspirasi tersebut diputuskan melalui rapat yang dipimpin kepala sekolah. Gagasan yang telah diputuskan tersebut disosialisasikan ke seluruh warga sekolah serta pemangku kepentingan yang ada. Terakhir, dilakukan peninjauan kembali secara berkala disesuaikan dengan perkembangan sekolah. Dalam pelaksanaan visitasi, semua hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen terkait antara lain dokumen visi, misi, serta tujuan, dan daftar hadir kegiatan perumusan instrumen penting tersebut. Selanjutnya tim visitasi melakukan observasi langsung ke sekolah untuk melihat ketersediaan bukti fisik dokumen yang diperlukan. Terakhir, tim visitasi melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perumusan dan sosialisasi visi tersebut (Wening, 2020).

f. Standar pembiayaan

Standar pembiayaan memuat kriteria dalam yang berisi komponen dan besarnya biaya operasional pendidikan yang dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun(Charisma Dewi Setyaningsih, 2017).Ruang lingkup pembahasan dalam standar ini antara lain: rencana kerja anggaran terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pendidik, pengembangan tenaga kependidikan, serta modal kerja(Charisma Dewi Setyaningsih, 2017).

g. Standar penilaian

Standar penilaian adalah standar yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar(Suryana, 2005). Pada standar ini, pendidik diberikan pedoman dalam memberikan penilaian terhadap pencapaian peserta didik. Seorang pendidik tidak bisa memberikan penilaian kepada peserta didik secara sembarangan, melainkan dilakukan secara profesional dengan memerhatikan prinsip-prinsip antara lain Pertama dilakukan dengan sah atau benar, artinya apa yang dinilai itulah fakta yang sebenarnya. Kedua objektif, yakni sesuai dengan pencapaian peserta didik. Ketiga yaitu adil, tidak membedakan peserta didik yang satu dengan yang lain. Tidak menguntungkan peserta didik berdasar berlatar belakang agama, suku, budaya, atau adat istiadat. Prinsip keempat yaitu terbuka, artinya poin dan item yang menjadi penilaian dapat diketahui oleh peserta didik. Kelima yakni akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan(Wening, 2020).

h. Standar pendidik dan tenaga kependidikan

Standar ini memuat seperangkat kriteria mengenai pendidikan pra-jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan(Charisma Dewi Setyaningsih, 2017). Dalam hal ini, pendidik maupun tenaga kependidikan yang menjalankan tugas di sebuah lembaga pendidikan, harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan secara profesional.

Selain dengan pembahasan diatas, dalam akreditasi juga meliputi beberapa prinsip yang harus ditegakkan dalam pelaksanaannya, yakni :

- a. Objektif, pada prinsipnya akreditasi merupakan upaya untuk melihat kondisi satuan pendidikan dalam menjalankan proses pembelajaran, oleh karena dalam peneliannya harus dilakukan secara objektif sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- b. Komprehensif, penilaian dalam akreditasi dilakukan secara keseluruhan, tidak terbatas pada aspek – aspek tertentu saja agar mendapatkan informasi sekolah secara utuh dan menyeluruh.
- c. Adil, semua lembaga pendidikan, baik sekolah ataupun madrasah mendapatkan pelayanan penilaian yang sama, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal itu dilakukan tanpa memandang kultur sosial-budaya, keyakinan, ras, maupun status sekolah negeri maupun swasta.
- d. Transparan, setiap sekolah yang bersiap untuk dilakukan akreditasi memiliki hak akses keterbukaan informasi yang berkaitan tentang kriteria, jadwal, sistem penilaian, persyaratan, dan hal-hal yang harus dipenuhi selama proses akreditasi
- e. Akuntabel, proses maupun hasil selama akreditasi dipertanggungjawabkan.
- f. Profesional, akreditasi dilakukan secara hati-hati oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga proses dan hasil yang didapatkan nanti bisa digunakan untuk acuan dan dasar perbaikan.

Konsep Standar Mutu

Standar adalah parameter yang dapat digunakan untuk mengkarakterisasi ciri-ciri umum dari output proses yang menandakan seberapa baik produk atau layanan dibuat. Karena standar mutu tidak dapat dipenuhi tanpa proses manajerial yang sistematis, maka proses sistematis adalah ikhtiar untuk mencapai mutu sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan (Kumala & Hakim, 2021). Kebahagiaan pelanggan, serta tidak adanya keluhan pelanggan, atau yang dikenal sebagai nol kesalahan, adalah indikator bahwa kriteria kualitas yang ditetapkan telah terpenuhi.

Prosedur terorganisir yang disebut kualitas membantu membuat produk lebih baik (Luluk Atirotu Zahroh, 2018). Kemampuan lembaga pendidikan untuk memanfaatkan sumber daya pendidikan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kapasitas belajar inilah yang dimaksud dengan kualitas pendidikan dalam konteks ini (Luluk Atirotu Zahroh, 2018). Dalam dunia bisnis, kualitas akan selalu dikaitkan dengan proses terjadinya suatu produk barang maupun jasa dalam seluruh rangkaian proses, yaitu bagaimana barang atau jasa tersebut diproduksi dan disajikan kepada pelanggan, mulai dari input bahan baku yang akan diolah, diikuti dengan proses mengubah bahan

baku menjadi barang jadi, terhadap output barang/jasa yang dihasilkan. Ketika membahas kualitas dalam konteks pendidikan, ini mengacu pada upaya untuk menawarkan kepada pengguna layanan pendidikan, layanan yang lengkap dan puas. Kualitas sistem penyelenggaraan pendidikan juga akan selalu terhubung dengan bagaimana peserta didik berkontribusi, bagaimana pendidikan diberikan dengan penekanan pada layanan peserta didik, dan bagaimana output lulusan dihasilkan (Suryana, 2005). Kualitas di bidang pendidikan mengacu pada program dan hasil pendidikan yang dapat memenuhi harapan sejalan dengan tahap perkembangan masyarakat dan dunia kerja (Garnika, 2022).

Oleh karena itu, spesifikasi teknis yang terstandarisasi berdasarkan kesepakatan dan semua pihak terkait dengan tetap memperhatikan keadaan individu, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman inilah yang dimaksud dengan standar mutu. Dalam rangka mewujudkan persiapan yang sehat di bidang pendidikan, standar mutu berfungsi sebagai Penjaminan Mutu. Pentingnya standar kualitas dalam kontrol kualitas tidak dapat dilebih-lebihkan, terutama dalam hal terus mencapai kualitas yang diinginkan.

Efektivitas Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Predikat sebagai sekolah Unggulan memberikan dorongan bagi SMP Muhammadiyah 1 Prambanan untuk terus menjaga kualitasnya. Kualitas pendidikan dapat terlihat dari akreditasinya yang menduduki peringkat A, yang boleh jadi dimaknai sebagai sekolah yang berkualitas baik sesuai dengan standar pendidikan nasional. Akreditasi tentu menjadi prasyarat utama bagi konsumen pendidikan yakni peserta didik dan wali murid untuk menjadikan pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan yang baik bagi anaknya. Diera persaingan antar lembaga saat ini tentu orang tua semakin lebih selektif dalam memilihkan sekolah bagi anak – anaknya (Azizah & Witri, 2021). Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan sendiri dalam menjaga kualitas pendidikan sangat memerhatikan beberapa aspek, diantaranya : aspek standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Dari masing – masing standar inilah dapat dijabarkan sebagaimana berikut ini :

- a. Standar isi, dalam standar isi yang berisi materi pembelajaran yang distandarisasi dengan standar pendidikan nasional tentu SMP Muhammadiyah 1 Prambanan sebagai sekolah dibawah naungan Muhammadiyah memiliki ciri khas yang berbeda dengan sekolah pada umumnya. Selain mengikuti aturan pemerintah dalam hal pembelajaran umumnya juga ada mata pelajaran yang menjadi penciri sekolah Muhammadiyah yakni rumpun ISMUBA (Islam Muhammadiyah dan bahasa Arab) mata pelajaran yang masuk dalam rumpun ini seperti : Tarikh, Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fiqih, dan Bahasa Arab. Rumpun mata pelajaran Ismuba ini menjadi penciri utama sekolah

- muhammadiyah sebagaimana disampaikan dalam wawancara “mata pelajaran disini jelas mengikuti pemerintah kurikulumnya juga yang kelas 7 mulai memakai kurikulum merdeka, namun ada rumpun yang menjadi ciri khas kami yakni rumpun mata pelajaran Ismuba”(Ibu Daswati R. Sahifah, 2022). Dari sinilah dapat kita ketahui untuk menjaga citra akreditasi sekolah maka ada satu penguatan dalam rumpun mata pelajaran yang menjadi ciri khas dari Muhammadiyah.
- b. Standar kompetensi lulusan, capaian lulusan dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan didesain agar dapat lulus tidak hanya sekedar bekal ilmu pengetahuan umum saja melainkan juga memiliki pemahaman dalam bidang keagamaan. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan itu maka didesainlah program baca tulis al -qur'an yang rutin dilakukan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Selain itu dengan terbrandingnya sekolah dengan istilah “sekolahnya anak sholeh” maka terdapat program diluar jam pelajaran yakni program character building, dimana peserta didik didampingi tutor untuk berlatih, dan berdiskusi serta praktik pembiasaan karakter baik dalam hidup sehari – hari. “program sekolah disini ada banyak untuk menunjang tambahan agar anak didik memiliki karakter yang baik dan dapat membaca qur'an maka ada BTQ dan character building”(Ibu Vivin, 2022).
 - c. Standar proses, dalam standar proses ini tentu untuk mencapai tujuan capaian lulusan yang didesain oleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dibuatlah program pendidikan yang full day school dengan muatan kegiatan yang beragam, di pagi hari ada program BTQ, dengan harapan lulus dari SMP Muhammadiyah 1 Prambanan memiliki kompetensi baca dan tulis al – Qur'an. Lalu program les dan character building yang diharapkan para siswa dapat memiliki karakter yang baik sesuai tagline atau semboyan yang ada yakni “Sekolahnya Anak Sholeh”. Maka upaya tersebut dilakukan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, sebagaimana disampaikan “disekolah ini full kegiatan baik akademik dan non akademik. Karena disini kami mendidik anak – anak yang mereka butuh sentuhan para pendidik dengan intens, maka kami full kan kegiatan pendidikan, agar harapan kami lahirnya anak – anak sholeh ini bisa terwujud.”(Ibu Daswati R. Sahifah, 2022)
 - d. Standar sarana dan prasarana, dalam dunia pendidikan sarana dan prasarana tentu menjadi suatu hal komponen penting yang harus tersedia dalam memberikan pelayanan bagi peserta didik. Dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal tentu SMP Muhammadiyah 1 Prambanan mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan standar pendidikan nasional yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa hal yang kurang memadai dengan baik seperti ketersediaan kantin dan Ruang UKS, serta ruang Guru yang dinilai belum representatif. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam wawancara “secara kebutuhan pokok fasilitas sudah cukup terstandar, namun patut diakui bahwa masih ada ruang – ruang yang tidak representatif seperti UKS, Ruang guru, dan kamtin siswa.”(Ibu Anggraita, 2022) Meski demikian menurut pengamatan peneliti di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan terus melakukan

- pembenahan dan perbaikan serta penambahan fasilitas sarana dan prasarana yang sekiranya kurang memadai. Hanya saja semuanya bertahap karena mempertimbangkan berbagai hal termasuk anggaran.
- e. Standar pengelolaan, dalam standar pengelolaan tentu SMP Muhammadiyah 1 Prambanan mengupayakan aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan secara menyeluruh dan kolektif kolegial. Perencanaan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dilakukan dengan rapat tahunan yang output dari rapat itu ialah terbentuknya RAPBS, yang pada akhirnya menjadi acuan pelaksanaan program pendidikan. Adapun pengawasan yang ada, tentu selain diawasi dari dinas atau UPT, juga diawasi dari persyarikatan melalui pimpinan cabang, serta juga pengawas internal yang melibatkan guru karyawan juga komite. (Ibu Daswati R. Sahifah, 2022)
 - f. Standar pembiayaan, dalam pendidikan pembiayaan menjadi salah satu faktor penting penunjang keberhasilan proses pendidikan yang ditempuh. Namun bukan berarti tanpa adanya dana lantas pendidikan tidak dapat berjalan, dapat berjalan hanya saja mungkin tidak maksimal. Di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan dalam menentuka pembiayaan tentu disepakati dalam penggodakan program melalui rapat dinas internal dan juga rapat dinas yang melibatkan komite sekolah yang pada akhirnya menyepakati kebutuhan anggaran yang dibutuhkan guna menunjang proses pendidikan. Dalam aspek pembiayaan ini di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan mendapat sumber dana dari wali murid, kolaborasi antar lembaga, infaq harian, dan juga dana dari pemerintah berupa BOS. (Ibu Vivin, 2022)
 - g. Standar penilaian, standar penilaian yang digunakan oleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan tentu mengacu kepada kurikulum yang diterapkan. Untuk kelas 7 saat ini menggunakan kurikulum merdeka dan kelas 8, 9 menggunakan kurikulum 2013. Maka terdapat perbedaan dalam mekanisme penilaian yang dilakukan. Sebagaimana disampaikan “penilaian ada perbedaan antara kurikulum merdeka dan kurikulum 2013, juga muatan materinya terdapat perbedaan”. (Ibu Anggraita, 2022)
 - h. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan sebagian besar telah memenuhi kualifikasi pendidik dan tenaga pendidikan yakni sebagai lulusan S1 pada bidangnya masing – masing. Adapun untuk linieritas memang ada beberapa yang tidak linier, namun masih serumpun dengan mata pelajaran yang diampunya.

Dari pemaparan diatas, mengacu pada standar pendidikan nasional, maka secara umum SMP Muhammadiyah 1 Prambanan telah memenuhi persyaratan akreditasi yang sesuai kondisi yakni nilai A untuk jenjang lembaga pendidikan SMP. Dengan akreditasi tersebut upaya yang dilakukan untuk memberikan kualitas pendidikan telah dilakukan dengan sebaik – baiknya, hal ini terbukti dari upaya perbaikan dan upaya menertapi aturan yang dilakukan oleh SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, serta meningkatnya peminat

yang bersekolah di SMP Muhamadiyah 1 Prambanan dari kurun waktu 2020 hingga 2022, meningkat hingga dapat membuka enam rombongan belajar atau enam kelas.

Kesimpulan

Dari pemaparan hasil dan pembahasan diatas maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, efektivitas akreditasi dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan memiliki suatu dampak yang memeberikan pengaruh positif bagi perkembangan lembaga. Tercapainya akreditasi A tidak dapat dilepaskan dari upaya SMP Muhamadiyah 1 Prambanan dalam memenuhi delapan standar pendidikan nasional, meski dalam faktanya disebutkan tidak dapat secara sempurna memenuhi standar tersebut namun setidaknya kebutuhan pokok lembaga dapat terpenuhi. Aspek sarana dan prasarana menjadi catatan tersendiri untuk terus dapat dibenahi dan dipenuhi agar tercukupi secara baik. Implikasi dari tercapainya akreditasi A, maka dalam kurun waktu 2020 hingga 2022 peminat peserta didik di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan terus mengalami kenaikan, hal ini dibuktikan saat ini terdapat enam kelas untuk jenjang kelas 7 dan 8, dan lima kelas untuk jenjang kelas 9.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridoni, Suntama Putra, Salfen Hasri, S. (2022). Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13832–13838.
- Amri, K., Riyantini, S., Hasri, S., & Sohiron, S. (2022). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Batam. *JIM : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(2), 408–421.
- Asep Kurniawan. (2018). *Metodologi Penelitian pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya*.
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah Sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal SAP*, 2(1), 12–21.
- Azizah, L., & Witri, S. (2021). Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penerapan Total Quality Management dalam Program Akreditasi Sekolah. *Dawuh Guru : Jurnal Pendidikan MI/SD*, 1(1), 69–78. <https://doi.org/10.35878/guru.v1i1.263>
- Charisma Dewi Setiyaningsih. (2017). Status Akreditasi Dan Kualitas Sekolah Di Sekolah Dasar Negeri. *Jurnal Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 1(2), 138–145.
- Garnika, E. (2022). Akreditasi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Anak Usia Dini. *JPIIn : Jurnal Pendidikan Indonesia*, 5(1), 207–212.
- Heny Damayanti, Y. M. (2019). Analisis Pengaruh Komponen Akreditasi Terhadap Prestasi Kerja

- Paud Di Kota Palembang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 1(2), 145–167.
- I Putu Suardipa, K. P. (2020). Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Dalam Pemetaan Mutu Satuan Pendidikan. *PINTU : Jurnal Penjaminan Mutu*, 1(2), 143–153.
- Ibu Anggraita. (2022). *Hasil Wawancara Dengan Guru SMP Muh. 1 Prambanan, Pada 16 November*.
- Ibu Daswati R. Sahifah. (2022). *Hasil Wawancara dengan Kepala SMP Muhammadiyah 1 Prambanan, Pada 12 November*.
- Ibu Vivin. (2022). *Hasil Wawancara dengan Karyawan SMP Muh. 1 Prambanan, Ibu Vivin, Pada 14 November*.
- Irkhamiyati. (2017). Evaluasi Persiapan Perpustakaan Stikes ' Aisyiyah Yogyakarta. *Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 13(1), 37–46.
- Kumala, J. R., & Hakim, A. (2021). Analisis Dampak Akreditasi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Paud X Kota Pangkalpinang. *Journal Riset Pendidikan Guru PAUS*, 1(2), 75–78.
- Kurnaesih, U. (2019). Pentingnya Akreditasi Dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. *Al - Kahfi : Jurnal Pendidikan Anaka Usia Dini*, 1(2), 15–25.
- Luluk Atirotu Zahroh. (2018). Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam Melalui Penguatan Standar Akreditasi Pendidikan Nasional. *Al Wijdan : Journal Of Islamic Education Studies*, III(2), 253–264.
- Rahman, L. Z. (2020). Upaya Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Islam melalui Sistem Akreditasi dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) di SD Muhammadiyah Karangbendo Bantul. *Intelektual : Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(2), 201–215.
- Rulam Ahmadi. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta : Ar - Ruzz Media*.
- Sugiyono. (n.d.). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D ed. (Bandung : CV Alfabeta, 2016)*, 219.
- Suryana, A. (2005). Akreditasi, Sertifikasi dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, III(2), 1–14.
- Wening, S. (2020). Akreditasi Sebagai Pengembangan Program Studi Secara Berkesinambungan. *Prosiding Seminar Nasional APTEKINDO*, 1(2), 475–480.